

**ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY BUMDES FAMOHOUNI IN
VILLAGE MADULA KECMATAN GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI CITY
NORTH SUMATRA**

Sahala Purba¹, Arison Nainggolan², Alfanita Gratia Telaumbanua³

^{1,2,&3}Universitas Methodist Indonesia

Email : sahala824@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the Financial Management Accountability of Village Owned Enterprises in Madula Village, Gunungsitoli District, Gunungsitoli City, North Sumatra, whether it is in accordance with the financial management of BUMDes according to www.layananbimtek.com. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. Respondents in this study amounted to 10 people, namely: 1 village head, 1 village treasurer, 1 representative of the BPD (Village Consultative Body), 3 BUMDes Famohouni administrators, and 4 community members who participate in the management of BUMDes and who are around the location. BUMDes. The object of this research is the accountability of BUMDes financial management in the form of budgeting flow, administration flow, reporting and internal control. The results of this study indicate that the financial management of BUMDes Famohouni still has many shortcomings and is not in accordance with the financial management of BUMDes, but internal controls, regulations in the budgeting cycle stage and implementation of the administration stage are appropriate, and reporting on BUMDes Famohouni is mostly appropriate according to www.layananbimtek.com.

Keywords: Bumdes; Financial Management; Accountability

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES FAMOHOUNI DI DESA
MADULA KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA UTARA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu: 1 orang Kepala Desa, 1 orang bendahara desa, 1 orang perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 3 orang pengurus BUMDes Famohouni, dan 4 orang Masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes dan yang berada disekitar lokasi BUMDes. Objek penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes berupa Alur penganggaran, Alur penatausahaan, Pelaporan dan Pengendalian Internal. Hasil penelitian ini yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni masih banyak kekurangan dan belum sesuai dengan pengelolaan keuangan BUMDes, tetapi pengendalian internal, peraturan dalam tahap siklus penganggaran dan pelaksanaan tahap penatausahaan sudah sesuai, serta pelaporan pada BUMDes Famohouni sebagian besar sudah sesuai menurut www.layananbimtek.com.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan; Bumdes

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan BUMDes, masih banyak ditemukannya masalah dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Seperti pada fakta empirik yang bisa didapatkan terjadi pada berbagai desa yang ada di Indonesia. Salah satunya, terjadi di daerah Gunungsitoli yang diduga melakukan kecurangan seperti dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bendahara dan Direktris, dimana pengurus BUMDes melakukan penarikan dana BUMDes tanpa ada menyampaikan laporan kepada penasihat (Kepala Desa) (mediadunia.com). Selain itu, terdapat juga pada Desa Kala yang diduga membuat laporan fiktif tentang laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes yang dilakukan oleh kepala desa dan para pengurus BUMDes (katada.id). Adapun BUMDes pada Pulau Morotai yang mempertanyakan anggaran pada rekening BUMDes yang tidak dicairkan, tetapi ada juga yang dicairkan namun, kebanyakan BUMDes tidak jalan dan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban (beritamalut.co). Pada Desa Margayaja telah mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa tetapi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun (cyber88.co.id). Dan pada BUMDes Rensing Bat juga mengalami hambatan pada pengelolaannya, hambatan yang di hadapi kurangnya pendapatan yang didapatkan dari pendapatan usaha BUMDes terutama pada pengelolaan usaha yang dijalankan (rensingbat.desa.id).

Permasalahan yang biasa terjadi pada Akuntabilitas di BUMDes pada pengelolaan keuangan BUMDes-nya. Pengelolaan keuangan BUMDes masih banyak yang belum bisa memberikan laporan pertanggungjawabannya terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, seperti masyarakat dan beberapa pihak terkait lainnya. Ada juga pengelolaan keuangan BUMDes yang belum bisa membuat laporan keuangan BUMDes-nya sesuai dengan Standar Akuntansi- Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku dan juga laporan keuangan Bumdes yang seharusnya.

Pada penelitian pengelolaan keuangan BUMDes ini melakukan pengukuran menggunakan tahap-tahap pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com dimana terdiri dari Alur penganggaran, Alur penatausahaan, Pelaporan dan Pengendalian internal. Adapun dari beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Bumdes, yaitu:

Mahmudah (2018) metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu metode Kualitatif. Dari Hasil penelitian Laporan keuangan yang dihasilkan masih berupa laporan pemasukan dan pengeluaran sederhana yang belum dikonsolidasikan, sehingga pihak yang bertanggung jawab pada BUMDes belum bisa memperoleh laporan keuangan secara utuh, Unit usaha BUMDes desa Sungon legowo masih ada BUMDes baru, dan juga Sistem pengendalian intern masih teralalu lemah karena pengurus juga seorang pekerja.

Irawati dan Martanti (2017), metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan fenomenologi. Dari hasil penelitian selama ini pihak kantor desa kurang melakukan publikasi tentang jumlah aset apa saja yang dimiliki oleh kantor atau aparatur desa, sehingga sebelumnya pada laporan keuangan BUMDes belum mencantumkan aset-aset dari BUMDes tersebut dengan mengorganisasikan data, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun pola, dan membuat kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah badan hukum dengan batas wilayah yang diatur dan berdasarkan urusan pemerintahan, masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah unit usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui kepemilikan langsung atas barang milik desa, yang mengelola penanaman modal dan pelayanan jasa. tersendiri, dan pelayanan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes juga disebut sebagai badan usaha yang didirikan untuk memajukan peningkatan kesejahteraan desa, termasuk semuanya, dengan memanfaatkan aset dan potensi desa secara maksimal.

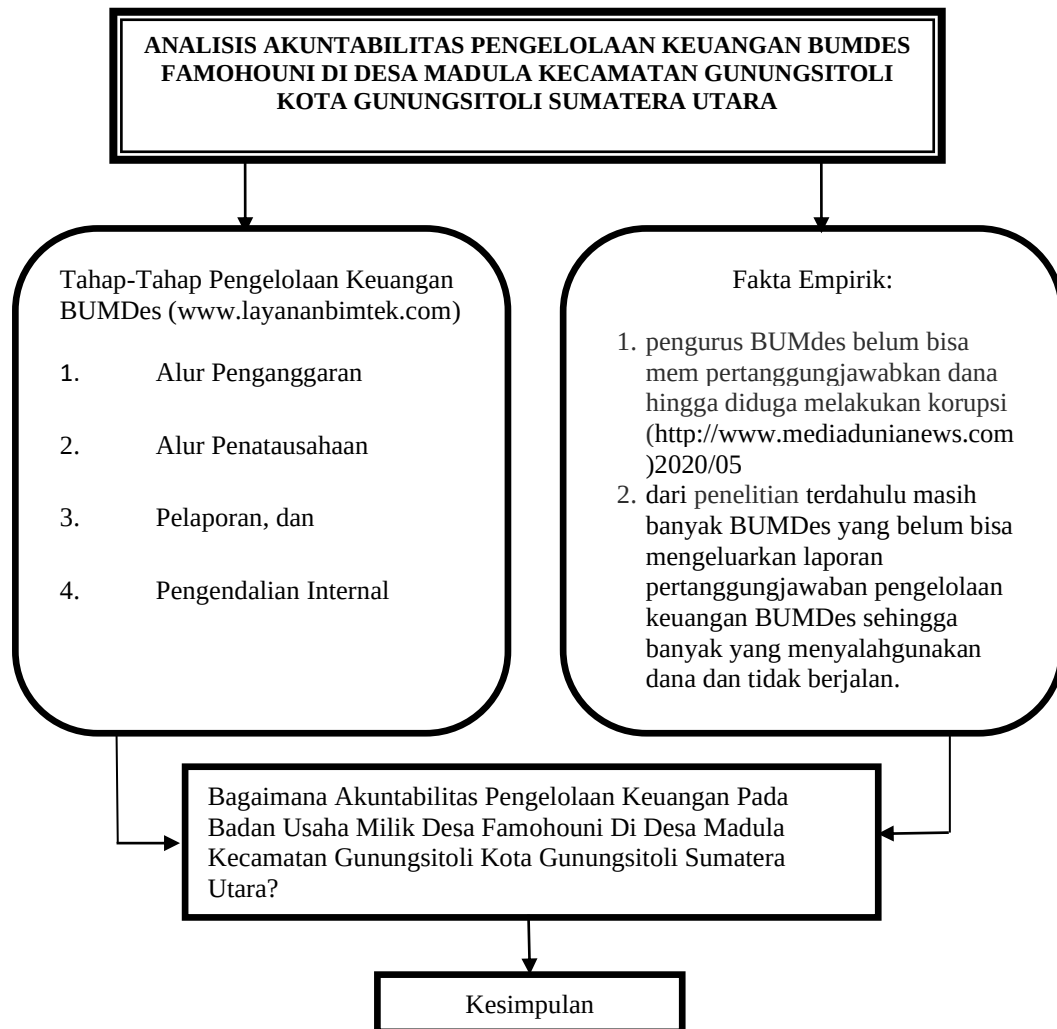
Akuntabilitas

Menurut Bastian (2010), istilah akuntabilitas dapat ditempatkan sebagai salah satu untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan hasil dan tindakan seseorang/badan hukum/pekerjaan tinggi Akuntabilitas Publik, mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan kinerja seseorang, suatu organisasi kepada pihak lain. orang lain yang memiliki hak dan keistimewaan ordonansi (Halim, 2012). Dari tujuan akuntabilitas di atas, maka perencanaan dapat mewujudkan indikator-indikator tanggung jawab menurut Permendagri Nomor 113 tentang pasal 20 - 38 keuangan desa, meliputi: Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan.

Pengelolaan Keuangan.

Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi bagi individu, keluarga maupun perusahaan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan

barang yang dapat dijadikan barang milik daerah yang berkaitan dengan hak tersebut. ditinjau dari indikator pengelolaan keuangan BUMDes menurut (www.layananbimtek.com), yaitu: Alur Penganggaran, Alur Administrasi, Pelaporan dan Pengendalian Intern.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Populasi dan Sampel

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pengurus BUMDes yang terdiri dari pengawas, pelaksana operasional, bendahara (BUMDes dan unit usaha) dan pengawas BUMDes serta beberapa komunitas (berada di sekitar lokasi BUMDes dan ikut serta dalam pengelolaan BUMDes) di Desa Madula, Kecamatan Gunungsitoli. Dengan rincian keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu: 1 orang Kepala Desa, 1 orang bendahara desa, 1 orang perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 3 orang pengurus BUMDes Famohouni, dan 4 orang Masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes dan yang berada disekitar lokasi BUMDes. Objek penelitian ini adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes berupa penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengendalian intern di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini di BUMDes Famohouni Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara tepatnya di gedung serbaguna milik Kepala Desa. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Agustus 20201.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data berupa laporan keuangan BUMDes dan masing-masing unit kegiatan BUMDes, selama tahun 2017 sampai 2019, data pembentukan masing-masing unit kegiatan BUMDes, pertanggungjawaban hasil usaha BUMDes dan pertanggungjawaban laporan keuangan BUMDes serta struktur organisasi BUMDes Famohouni

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mengolah dan Mempersiapkan Data untuk Dianalisis

Data penelitian ini dapat diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara. Yang menjadi narasumber pada wawancara tersebut yaitu kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pengurus BUMDes yang terdiri atas ketua BUMDes, bendahara BUMDes, dan pengawas, serta masyarakat Desa Madula (yang berada disekitar lokasi BUMDes dan yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes). Hasil dari dokumentasi pada penelitian ini merupakan data-data pada Pengelolaan Keuangan BUMDes mulai dari alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan, dan pengendalian internal di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk periode yang tidak ditentukan.

Membaca Keseluruhan Data

Peneliti akan membaca keseluruhan hasil dari transkrip wawancara dengan narasumber agar dapat memperoleh gagasan mengenai data dalam penelitian.

Menganalisis Lebih Detail dengan Meng-Coding Data

Proses coding dalam penelitian ini dengan cara melabeli data tulisan dari transkrip menjadi empat kategori, sesuai dengan tahapan pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com. Kategori tersebut yakni, Alur penganggaran, Alur penatausahaan, Pelaporan, dan Pengendalian internal.

Menerapkan Proses Coding untuk mendeskripsikan Setting, Orang-Orang, Kategori-Kategori, dan Tema-Tema yang akan Dianalisis.

Medeskripsikan proses pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Madula mulai dari Alur penganggaran, Alur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pengendalian Internal sesuai dengan www.layananbimtek.com, yaitu :

Pendeskripsian Proses Alur Penganggaran di BUMDes Famohouni Desa Madula.

Penganggaran pada BUMDes Famohouni hanya dilakukan pada saat awal pembentukan BUMDes pada tahun 2016 hingga 2019 yang dianggarkan pada dana desa. Untuk anggaran BUMDes dimusyawarahkan bersama-sama oleh pengurus internal. Setelah itu, bapak kepala desa menganjurkan penganggaran pada desa. Dari anggaran tahun 2016 hingga 2019 yang telah diberikan dana desa, BUMDes dapat mendirikan 4 unit usaha yaitu unit usaha simpan pijam, unit usaha jasa yang terdiri dari pemanfaatan lapangan futsal, pemanfaatan teratak dan panggung, pemanfaatan becak mesin pengantaran barang, dan pemanfaatan molen, unit usaha lahan pertanian, dan unit peternakan dan perikanan tetapi unit ini tidak berjalan lagi. Dalam membuat anggaran BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan tahap-tahap anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Pada BUMDes Famohouni di Desa Madula untuk setiap unit usaha tidak membuat penganggaran yang akan diberikan kepada bendahara secara tertulis.

Pendeskripsian Proses Alur Penatausahaan Di Bumdes Famohouni Desa Madula

Di BUMDes Famohouni baik bendahara umum maupun bendahara unit membuat buku kas. Bendahara unit akan memberikan laporan pencatatan keuangan selama sebulan yang terdiri dari pemasukan atau pendapatan yang mereka terima dan dikurangi dengan pengeluaran unit usaha selama sebulan

Pendeskripsian Proses Pelaporan di BUMDes Famohouni Desa Madula

Bendahara melakukan pelaporan kepada kepala desa sekali sebulan. Selain kepada kepala desa, Bendahara juga memberikan laporan keuangan kepada pengawas, BPD, dan pengurus BUMDes lainnya.

Pendeskripsian Proses Pengendalian Internal di BUMDes Famohouni Desa Madula

Sejak adanya BUMDes ini respon masyarakat ada yang antusias dan ada juga yang kurang mendukung kegiatan tersebut. Tetapi, dari hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang didapatkan BUMDes hingga saat ini dapat membuktikan bagaimana BUMDes ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan sangat membantu masyarakat setempat. Perkembangan BUMDes selama 4 tahun ini dapat berjalan bisa dilihat dari bertambahnya unit usaha. Pada kepengurusan BUMDes ini, kepala desa sangat tegas dalam mengawasi baik itu pengurus BUMDes maupun laporan keuangan BUMDes. Kepala desa akan selalu memantau dan mengevaluasi bagaimana

keseriusan para pengurus dalam mengelola BUMDes tersebut. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam BUMDes kepala desa bersama-sama dengan pengawas serta BPD tidak membiarkan pengurus untuk mengelola BUMDes sendirian atau tanpa arahan dari kepala desa.

Membandingkan ketentuan setiap ayat dalam www.layananbimtek.com, mengenai pengelolaan keuangan BUMDes dengan yang ada di Desa Madula. Berikut perbandingan dari pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com dengan hasil penelitian pada BUMDes Famohouni di Desa Madula sebagai berikut :

Perbandingan Proses Alur penganggaran di desa Madula dengan pengelolaan keuangan BUMDes

Tahapan awal pada proses alur penganggaran pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com yang pertama pada BUMDes Famohouni di Desa Madula masih belum sesuai dengan alur penganggaran tahap pertama yang menyatakan kepala desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.

Perbandingan Proses Alur Penatausahaan di Desa Madula dengan pengelolaan keuangan BUMDes

Tahapan awal pada proses alur penatausahaan pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com yang pertama pada BUMDes Famohouni di Desa Madula sudah sesuai dengan alur penatausahaan tahap pertama yang menyatakan bahwa Pelaksanaan tahap penatausahaan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Perbandingan Proses Pelaporan di Desa Madula dengan pengelolaan keuangan BUMDes

Tahapan awal pada proses alur pelaporan pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com yang pertama pada BUMDes Famohouni di Desa Madula sudah sesuai dengan pelaporan tahap pertama yang menyatakan bahwa Pelaporan buku kas umum Bendahara dan unit usaha BUMDes.

Perbandingan Proses pengendalian Internal di Desa Madula dengan pengelolaan keuangan BUMDes

Tahapan awal pada proses alur proses pengendalian internal pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com yang pertama pada BUMDes Famohouni di Desa Madula sudah sesuai dengan alur penganggaran tahap kedua yang menyatakan bahwa Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi, parameter-parameter yang menjadikan dewan pengawas mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola; struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Pembahasan

Proses Alur Penganggaran pada pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli

Secara keseluruhan, proses alur penganggaran di BUMDes Famohouni masih belum sesuai dengan alur penganggaran dalam pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.jasabimtek.com. Alur penganggaran ini menggambarkan rencana alokasi anggaran yang akan ditentukan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Di desa ini alur penganggaran masih belum sesuai karena anggaran untuk unit usaha disiapkan oleh kepala desa, bukan bendahara unit usaha, hasil anggaran gabungan tidak dibahas dan dilaporkan oleh kepala desa dalam rapat desa dan tidak ada penyusunan RKAT BUMDes setelah anggaran BUMDes disetujui. Pada tahapan siklus penganggaran jelas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyampaian anggaran kepada bendahara. Anggaran dari kepala desa yang diberikan kepada bendahara digabungkan menjadi pagu indikatif, hal ini dikarenakan anggaran yang diberikan oleh kepala desa, bendahara akan menyatukannya dalam laporan keuangan, bukan dalam satu dokumen anggaran. Setelah menyiapkan pagu indikatif dan disepakati bersama, dokumen tersebut dibuat menjadi pagu anggaran tetapi hal ini juga tidak dilakukan. Sehingga dari penelitian ini masih terdapat beberapa implementasi alur penganggaran di BUMDes Famohouni yang tidak sesuai dengan alur penganggaran dalam pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com.

Proses Alur Penatausahaan pada pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli

secara keseluruhan, proses alur administrasi di BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan alur administrasi dalam pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com, tetapi masih terdapat hal-hal yang kurang tepat terutama dalam administrasi pengeluaran, dimana dalam administrasi pengeluaran tidak ada kas kecil atau anggaran yang telah disiapkan oleh bendahara unit usaha untuk diserahkan kepada bendahara unit bisnis. Dengan tidak adanya anggaran yang disiapkan oleh bendahara unit usaha, maka tidak ada kas kecil. Pelaksanaan tahapan administrasi di BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun

2014. Dalam proses administrasi sebagian besar pendapatan sudah sesuai, yang belum dilaksanakan adalah kebijakan kepala desa untuk membuat kas kecil dan menyetor pendapatan ke bank. Awalnya ada rekening bank di BUMDes tetapi dana langsung digunakan, sehingga dana ditangan bendahara berkurang dan rekening bank tidak lagi digunakan

Proses Pelaporan pada pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli

Secara keseluruhan dari proses pelaporan di BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan pelaporan pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com. Namun masih ada hal yang belum dilaporkan oleh bendahara sesuai dengan data dokumen yang saya dapatkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan realisasi anggaran (bulanan) yang dibuat oleh BUMDes. Bendahara melapor dengan membuat buku kas umum dan bendahara unit usaha, dimana bendahara melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Bendahara unit usaha melaporkan buku kas kepada bendahara umum setiap bulannya. Dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes Famohouni ada tersedia, tetapi dalam penelitian ini tidak dapat diberikan, karena untuk kepentingan internal pengurus dan kepala desa.

Proses Pengendalian Internal pada pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli

Secara keseluruhan dari proses Pengendalian Internal di BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan Pengendalian Internal pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com. Masyarakat sangat senang dan bangga atas pembentukannya BUMDes Famohouni ini.

PENUTUP

Secara keseluruhan Alur penganggaran pada pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara tidak dapat dikatakan sesuai dengan www.layananbimtek.com. Karena ketentuan pada alur penganggaran masih ada yang belum dilaksanakan oleh Pengurus BUMDes serta Kepala Desa yaitu tidak adanya kebijakan terhadap anggaran unit usaha, tidak dokumen pagu indikatif, tidak dilaporkan dan dimusyawarakannya anggaran secara bersama-sama, tidak dibuatnya pagu anggaran, dan tidak adanya RKAT desa.

Secara umum proses alur penatausahaan pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara dapat dikatakan sebagian sudah sesuai dengan www.layananbimtek.com. Hal tersebut karena pada proses penatausahaan penerimaan masih ada yang belum dilakukan oleh Bendahara Umum, Kepala Desa dan Bendahara unit usaha yaitu mengenai tidak dibuatnya ketentuan kas kecil unit usaha yang gunanya agar penggunaan kas unit usaha terkontrol dan tidak adanya rekening bank BUMDes yang harusnya digunakan untuk menyimpan dana kas dari BUMDes. Pada proses penatausahaan pengeluaran juga semua belum ada dilakukan hal tersebut yaitu tidak adanya kebijakan minimal dari kas kecil, belanja dari unit usaha digunakan bukan dari kas kecil yang disediakan, tidak adanya nominal belanja unit usaha, dan apabila terjadi kekurangan dana maka tidak ada prosedur tertentu. Tetapi untuk tahap pelaksanaannya semuanya sudah sesuai.

Sebagian besar pelaporan pada proses pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara sudah dapat dikatakan sebagian sesuai dengan www.layananbimtek.com. Namun pada Laporan Realisasi Anggaran dari BUMDes ini tidak dibuat karena anggaran pendapatan dan belanja tidak dibuat pada awal periode, sehingga tidak dapat mengevaluasi kinerja pengurus BUMDes setiap tahunnya.

Secara umum proses pengendalian internal pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara sudah sesuai dengan www.layananbimtek.com. Mulai dari lingkungan pengendalian dimana masyarakat menerima BUMDes dan pengurus mengayomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola BUMDes, penilaian risiko dari tujuan dibuatnya BUMDes hingga manfaat BUMDes yang meminimalisir ketidaksesuaian dengan masyarakat, aktivitas pengendalian pada BUMDes yang mengalami perkembangan setiap tahunnya dan dapat menghasilkan melebihi modal awal, pemantauan yang dilakukan kepala desa dan pengawas membuat terkontrolnya pengurus BUMDes dan kepala desa mengevaluasi kinerja pengurus, hingga informasi dan komunikasi dari para pengurus dan kepala desa dapat sampai kepada masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Hal tersebut semua sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR RUJAKAN

Bastian Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga
Halim, kusyufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Irawati dan Martanti, 2017, Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar), Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER EBIS 2017)
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Jurnal Ecopreneur* volume 1, No. 2 , 52-56.
- Repubik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Repubik Indonesia, Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Repubik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Saryono. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- <http://www.mediadunianews.com/2020/05/dugaan-korupsi-dan-penyalahgunaan.html>
- <https://katada.id/dana-bumdes-kala-diduga-bermasalah-gpdeska-adukan-ke-inspektorat-bima/>
- <http://rensingbat.desa.id/musyawah-laporan-pertanggungjawaban-bumdes-rensing-bat/>
- <http://beritamalut.co/2020/07/14/terungkap-ternyata-ini-penyebab-sisa-anggaran-bumdes-belum-dicairkan/>
- <https://www.cyber88.co.id/berita/9885/anggaran-bumdes-tunas-jaya-dianggap-mainan-3-tahun-tanpa-laporan-pertanggungjawaban.html>
- <https://www.layananbimtek.com/bimtek-pengelolaan-keuangan-bumdes/>